



**PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP TINDAK
PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Militer Ii-08 Jakarta
Nomor: 50-K/PM II-08/Ad/II/2013)**

TESIS

EKO PUTRO HADI PRASETYO

1320922064

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**



**PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP TINDAK
PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Militer Ii-08 Jakarta
Nomor: 50-K/PM II-08/Ad/II/2013)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum**

EKO PUTRO HADI PRASETYO

1320922064

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eko Putro Hadi Prasetyo

NRP : 1320922064

Tanggal : 28 Januari 2016

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2016

Yang menyatakan,



Eko Putro Hadi Prasetyo

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eko Putro Hadi Prasetyo

NRP : 1320922064

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Militer Ii-08 Jakarta Nomor: 50-K/PM II-08/Ad/II/2013)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Januari 2016

Yang menyatakan,



Eko Putro Hadi Prasetyo

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Eko Putro Hadi Prasetyo

NPM : 1320922064

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Tindak Pidana
Asusila Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI (Studi Kasus
Terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor:
50-K/PM II-08/Ad/II/2013)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ketua Penguji



Prof. Dr. Indran Rini, S.H., M.S.
Penguji Ahli



Prof. Dr. Wahyono, S.H., M.S.
Penguji I/Pembimbing



Dr. Mohammad Hatta, S.H., M.Kn.
Penguji II/Pembimbing



Dr. Iwan Kresna Setiadi, S.E., M.M.
Direktur



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ka.Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Januari 2016

**PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP TINDAK PIDANA
ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI (Studi Kasus
Terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 50-K/Pm II-
08/Ad/II/2013).**

Eko Putro Hadi Prasetyo

Abstrak

Dewasa ini tuntutan terhadap pembangunan hukum semakin menguat, khususnya pembangunan hukum militer. Tuntutan beberapa pihak terhadap pembangunan hukum militer mengalami banyak perubahan, di antaranya tentang yuridiksi dan yustisiabel peradilan militer. Di dalam sejarah pembangunan hukum militer telah banyak terjadi perubahan. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah disadari perlunya memisahkan antara peradilan militer dengan peradilan umum. Di dalam peradilan militer yang subyek hukumnya adalah militer tentunya akan akan berbeda juga di dalam pembedanaannya. Salah satunya adalah tentang putusan hakim mengenai pidana tambahan pemecatan yang hal ini tidak berlaku di dalam lingkungan peradilan umum. Pembedanaan pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan pelaku tindak pidana menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat kembali menjalani hidup lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Terlebih bagi seorang prajurit TNI dimana tujuan pembedanaan bukanlah untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan agar dapat kembali bertugas di satuannya. Seorang militer yang telah menjalani hukuman di dalam pemasyarakatan militer harus menjadi militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil dari pendidikan yang dia terima selama di dalam rumah pemasyarakatan militer. Hal yang menarik adalah adanya hukuman tambahan di dalam Putusan Hakim di dalam lingkup Peradilan Militer. Hukuman tambahan ini diberlakukan bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan dianggap bahwa perbuatannya dinilai dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit. Pada penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pidana tambahan pemecatan dengan menganalisa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 50-K/PM II-08/AD/II/2013. Bagi hakim Militer, selain mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, harus pula diperhatikan asas-asas serta doktrin-doktrin yang dipegang teguh oleh TNI serta memperhatikan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Sehingga seorang prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Kata Kunci : Pemecatan, Hukuman Tambahan, Peradilan Militer

**DISMISSAL AS ADDITIONAL VERDICT AGAINST INDECENCY DONE
BY ARMY PERSONNEL (A CASE STUDY OF THE MILITARY COURT
VERDICT II-08 JAKARTA NO. 50-K / PM II-08 / AD / II / 2013)**

Eko Putro Hadi Prasetyo

Abstract

Today We need to strengthen legal development, especially the military law. The demands of some parties on the development of military law experience many changes, including on jurisdiction and yustisiabel military justice. In the history of the development of military law has been a lot of changes. Since the establishment of the Republic of Indonesia has realized the need to separate the military courts with general courts. In the military court that the subject of military law is certainly going to be different as well in punishment. One is about the verdict regarding the additional penalty of dismissal. Punishment is essentially intended to make criminals become aware and do not repeat his actions and can re-live a better life in accordance with the values that exist in the society. Especially for the Indonesian National Armed Forces where punishment is not intended to give revenge, but rather to provide guidance and education to be back on duty in the unit. A military man who has served in the military correctional should be a good military and useful either because of his own consciousness and as a result of the education he received while in the military correctional unit. The interesting thing is that there is an additional penalty in the ruling within the scope of Military Justice. This additional penalty imposed for Army personnel who commit a crime and considered that the actions assessed can damage the the soldier's life. In this study conducted to determine additional criminal law provisions against dismissal by analyzing Verdict of Jakarta Military Court II-08 Number: 50-K / PM II-08 / AD / II / 2013. For military judge, in addition to considering the elements of criminal offenses committed by soldiers, it should also be noted the principles and doctrines are held firmly by the military and with regard to the implementation of national defense and security. So that the soldiers involved in a criminal act can be sentenced to an additional form of dismissal from military service.

Keywords: Dismissal, Additional Punishment, Military Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Istriku tercinta Vanessa Pattiasiana yang selalu memberikan dorongan dan dukungannya dalam setiap kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas tercinta ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M. Sc., Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE., MM, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Ibu Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N selaku Ketua Program Magister hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Bapak Prof. Dr. Wahyono S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Bapak Dr. Moh. Hatta, SH, M.kn selaku selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Tujuan Penelitian.....	5
I.4 Manfaat Penelitian.....	6
I.5 Kerangka Teori	6
I.6 Kerangka Konseptual	14
I.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	17
II.1 Teori Kebijakan Kriminal	17
II.2 Teori <i>Rule of Law</i>	18
II.3 Teori Sistem Peradilan Pidana	20
II.4 Teori Penegakan Hukum	22
II.5 Tindak Pidana dan Teori Pemidanaan	24
II.6 Tinjauan tentang prajurit TNI	37
II.7 Tinjauan Tentang Peradilan Militer	40
II.8 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila	53
II.9 Tinjauan umum tentang Delik Aduan	55
BAB III METODE PENELITIAN	62
III.1 Jenis Penelitian	62
III.2 Pendekatan dalam Penelitian Hukum	62
III.3 Sumber Bahan hukum	63
III.4 Metode Penyajian bahan hukum	65
III.5 Metode Analisis Bahan hukum	65
BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN	66
IV.1 Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: PUT/ 123-K/ PM.II-08/ AD/V/ 2014	66
IV.2 Analisa Kasus	75
IV.3 Ketentuan tentang pidana tambahan	80
IV.4 Pertimbangan hakim dalam memberikan pidana tambahan pemecatan	82

BAB V PENUTUP.....	84
V.1 Kesimpulan	84
V.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	